



PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI

2017-2019



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

Kawasan Industri Airkantung, Jalan Timah Raya, Sungailiat 33211; www.polman-babel.ac.id

INFORMASI DASAR INSTITUSI

1. Nama Institusi : Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
2. Alamat : Kawasan Industri Air Kantung
Jl. Timah Raya, Sungailiat, Kabupaten Bangka
Kode Pos: 33211
Telpon: 0717 – 93586; Fax: 0717 – 93585
Email: polman@polman-babel.ac.id
3. Tim Reformasi Birokrasi
 - Pengarah : Direktur
Telepon 0717 – 93586
HP. 081393394884
Email: s.ariyono@gmail.com
 - Pelaksana : Ketua : Herwandi
Telepon : 0717 – 93586
HP : 081322114523
Email : herwandi@polman-babel.ac.id
Sekretaris : Indra Feriadi
Telepon : 0717 - 93586
HP : 081271861004
Email : indra@polman-babel.ac.id
Anggota :
 1. Manajemen Perubahan : Ardian Wahyu Setiawan
 2. Pengawasan : Robert Napitupulu
 3. Akuntabilitas : M.Subhan
 4. Kelembagaan : Erwanto
 5. Tata Laksana : Zulfan Yus Andi
 6. Manajemen SDM : Meiyendra
 7. Peraturan : Nur Jakiya
 8. Pelayanan Publik : Husman

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Peta Jalan Reformasi Birokrasi dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan oleh ketentuan dan perundang-undangan.

Peta Jalan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 serta berdasarkan surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 286/A.A4/KP/2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.

Penyusunan Peta Jalan Reformasi Birokrasi ini merujuk pada Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, menyajikan gambaran umum birokrasi dan agenda reformasi birokrasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2017-2019. Fokus reformasi birokrasi pada 8 (delapan) program area perubahan, yaitu: 1) manajemen perubahan; 2) penguatan pengawasan; 3) penguatan akuntabilitas kinerja; 4) penguatan kelembagaan; 5) penguatan tatalaksana; 6) penguatan sistem manajemen SDM aparatur; 7) penguatan peraturan perundang-undangan; dan 8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peta Jalan ini merupakan pedoman utama dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dalam bentuk komitmen, kerja keras dan sinergisitas dari semua pihak, mulai dari pimpinan, unit kerja, serta pegawai di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Program-program aksi dalam agenda reformasi ini diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Sungailiat, 31 Maret 2017
Direktur,

Dr. Sugeng Ariyono, M.Eng
NIP. 196311131991031002

DAFTAR ISI

Informasi Dasar Institusi	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kerangka Reformasi Birokrasi	3
BAB II Gambaran Birokrasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung	5
A. Kondisi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung	5
B. Harapan Pemangku Kepentingan	7
C. Permasalahan Birokrasi	7
D. Upaya Mengatasi Permasalahan	9
BAB III Agenda Reformasi Birokrasi 11	
A. Manajemen Perubahan 11	
B. Penguatan Sistem Pengawasan 13	
C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 15	
D. Penguatan Kelembagaan 17	
E. Penguatan Tata Laksana 19	
F. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur 21	
G. Penguatan Peraturan Perundang-undangan 25	
H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 28	
I. Quick Wins: Unit Layanan Terpadu 31	
BAB IV Monitoring dan Evaluasi	34
A. Monitoring	34
B. Evaluasi	34
BAB V Penutup	36
Lampiran	37

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi adalah sebuah komitmen nasional, termasuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Dalam hal ini, peran Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dalam mendukung keberhasilan reformasi sangatlah strategis. Salah satu peran konkrit Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dalam mendukung reformasi birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah dengan turut menjadi pelaku reformasi tersebut. Dokumen Peta Jalan Reformasi Birokrasi tahun 2017-2019 menjadi bukti komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi dan manifestasi kesiapan menjalankan reformasi birokrasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

Peta jalan reformasi birokrasi ini akan menjadi rujukan utama pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 2017-2019 dan berisi gambaran perihal langkah-langkah strategis dan agenda yang akan dilaksanakan terkait dengan pembenahan birokrasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi nasional.

Mengacu pada kondisi birokrasi terkini, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi periode 2017-2019. Dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpijak dari hasil reformasi birokrasi sebelumnya, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menjalankan delapan program area perubahan, yaitu 1) manajemen perubahan; 2) penguatan pengawasan; 3) penguatan akuntabilitas kinerja; 4) penguatan kelembagaan; 5) penguatan tata laksana; 6) penguatan sistem manajemen SDM aparatur; 7) penguatan peraturan perundang-undangan; dan 8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara umum, masing-masing program area perubahan memiliki tujuan spesifik sebagai berikut:

- Manajemen Perubahan bertujuan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.
- Penguatan Pengawasan bertujuan menciptakan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas KKN.
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber yang dipergunakannya.
- Penguatan Kelembagaan bertujuan mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien
- Penguatan Tata Laksana bertujuan mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.
- Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur bertujuan memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.
- Penguatan Peraturan Perundang-undangan bertujuan terciptanya sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertujuan mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk menjalankan agenda reformasi ini, diperlukan adanya dukungan dana serta unit pelaksana yang bertanggung jawab menjalankan program ini. Garis besar rencana anggaran reformasi birokrasi

di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah tersusun bagi terlaksananya reformasi birokrasi pada kedelapan program area perubahan. Perkiraan total rencana anggaran dari tahun 2017 hingga tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.673.386.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Sementara dari segi waktu pelaksanaan, keseluruhan tahapan kerja delapan program reformasi birokrasi dilaksanakan dalam kurun waktu 2017 hingga 2019.

Sebagai bagian integral dari program reformasi birokrasi, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung menetapkan program quick wins, yakni suatu program unggulan yang mudah dan cepat dicapai dalam mengawali suatu program yang untuk mendapatkan momentum yang positif dan kepercayaan dari masyarakat terhadap citra birokrasi. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung menetapkan program “Pembangunan dan Pengembangan Unit Layanan Terpadu” sebagai program quick wins.

Berbagai langkah reformasi sebagaimana dijelaskan dalam peta jalan ini yang dilakukan di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung merupakan program yang melembaga, berkesinambungan, dan diharapkan bergulir terus tanpa kehilangan momentum reformasi. Untuk itu, guna mendukung program tersebut, Pimpinan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung telah sepakat untuk memegang komitmen yang kuat agar program reformasi ini dapat bergulir sehingga akan dilahirkan birokrasi yang efisien dan profesional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan pendidikan tinggi merupakan faktor yang penting dalam pembangunan di Indonesia. Pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi hanya akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jika pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi mampu menghasilkan produk teknologi dan inovasi serta sumber daya manusia yang terampil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat.

Oleh karena itu, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melaksanakan program reformasi birokrasi tahun 2017-2019 sebagai pijakan dalam melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Pembenahan awal dimulai dengan upaya mereformasi tata kelola pemerintahan yang mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga mengubah mental aparatur. Tujuan akhir dalam tiga tahun ke depan diharapkan melalui reformasi birokrasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung mendukung upaya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja.

Inti pelaksanaan reformasi birokrasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung adalah perubahan mental aparatur. Tetapi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh elemen sistem yang melingkup aparatur. Untuk itu, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung berusaha untuk mengikuti irama reformasi birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process).
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management).
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online.
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

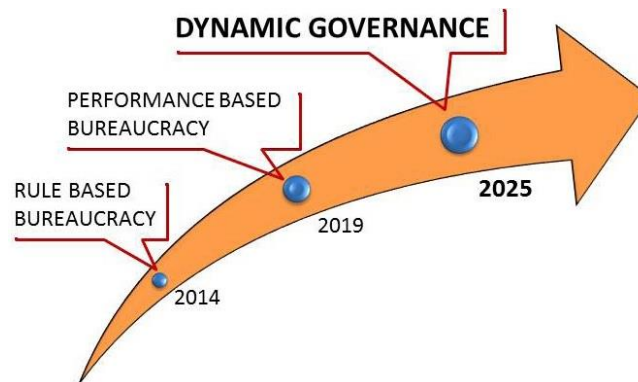
C. Kerangka Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi pun perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat (level) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual). Oleh karena itu, reformasi birokrasi nasional perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Pada tahun 2019, perubahan atau perbaikan diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin

profesional, dan mind-set serta culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Tujuan akhir dalam lima tahun ke depan diharapkan melalui reformasi birokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis.



Gambar 1.1 Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

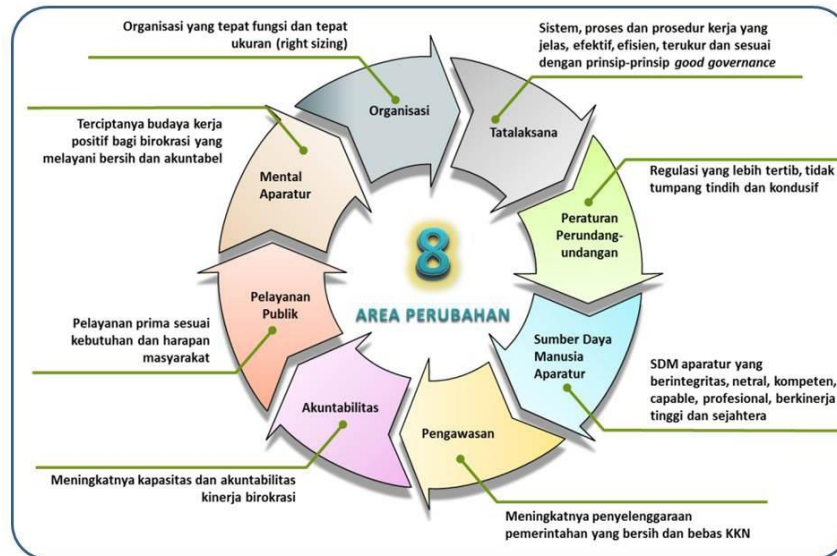
- a. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
- b. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil).
- c. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
- d. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi:



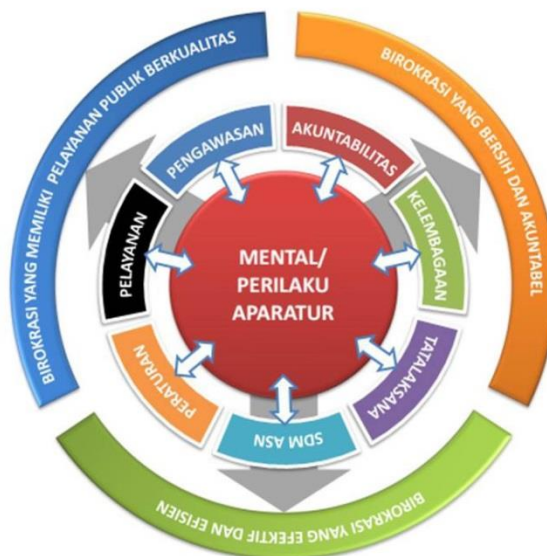
Gambar 1.2 Sasaran Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi. Area-area perubahan reformasi birokrasi tersebut meliputi: a) mental aparatur; b) Organisasi; c) Tata Laksana; d) Peraturan Perundang-undangan; e) Sumber Daya Manusia Aparatur; f) Pengawasan; g) Akuntabilitas; h) Pelayanan Publik.



Gambar 1.3 Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur. Tetapi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur. Keterkaitan antara area perubahan dan sasaran reformasi birokrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.4 Keterkaitan Area Perubahan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI

POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

A. Kondisi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung

Amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung menyatakan bahwa Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi.
2. Pelaksanaan penelitian.
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika.
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

Susunan organisasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung terdiri dari:

1. Dewan Penyantun
2. Direktur dan Pembantu Direktur
3. Senat Akademik
4. Jurusan
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama
7. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
8. Unit Pelaksana Teknis

Dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan dan menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, maka pada tahun 2015-2019 Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung menetapkan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa”

Visi menjadi politeknik yang bermutu bertujuan agar Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dapat menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan yang baik, terdidik dan terampil, sedangkan iptek dan inovasi merujuk pada keahlian dalam penerapan, penelitian, dan pengembangan iptek manufaktur yang didukung oleh aspek kelembagaan, sumber daya dan jaringan. Sementara itu, daya saing bangsa merupakan aspek tujuan dimana Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dapat berkontribusi dalam perekonomian melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, serta pendidikan yang menghasilkan lulusan terampil.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung adalah:

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.

2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Misi tersebut merepresentasikan upaya politeknik untuk menjawab permasalahan pembangunan iptek dan pendidikan politeknik pada periode 2015-2019, terutama dalam aspek pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, riset dan pengembangan, serta penguatan inovasi.

Untuk mencapai visi dan misi politeknik yang telah ditetapkan, maka visi dan misi tersebut dirumuskan dalam bentuk operasional yang lebih terarah, yaitu berupa tujuan strategis (strategic goal). Dalam rangka memecahkan permasalahan pembangunan iptek dan pendidikan politeknik yang dihadapi, seperti yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, maka tujuan strategis yang harus dicapai politeknik adalah:

“Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia berpendidikan politeknik, serta kemampuan Iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk keunggulan daya saing bangsa”

Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam 5 sasaran strategis sesuai dengan permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu dari 2015-2019. Sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
3. Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
4. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
5. Menguatnya kapasitas inovasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

Untuk mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian tujuan serta sasaran strategis, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung melakukan reformasi birokrasi pada aspek kelembagaan, tata laksana, SDM ASN, pengawasan, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan. Reformasi birokrasi diharapkan mampu mengungkit terjadinya reformasi layanan di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019. Terdapat 8 (delapan) area perubahan yang menjadi fokus Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dalam melaksanakan reformasi birokrasi, yaitu:

1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Peraturan Perundang-undangan
3. Penguatan Kelembagaan
4. Penguatan Tata Laksana
5. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
6. Penguatan Sistem Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang terdiri dari:
 - a. Penguatan Layanan Mahasiswa

- b. Penguatan Layanan Dosen dan Tenaga Kependidikan
- c. Penguatan Layanan Penelitian dan Pengabdian
- d. Penguatan Layanan Kelembagaan

B. Harapan Pemangku Kepentingan

Semenjak ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2010, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung telah mengalami banyak perubahan, terutama dalam hal tata kelola institusi. Sebagai perguruan tinggi negeri baru, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dituntut untuk dapat menyesuaikan kebijakan institusi dengan kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan tinggi sehingga dapat berkontribusi terhadap usaha pencapaian target-target pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Tuntutan terhadap perguruan tinggi dalam berkontribusi terhadap daya saing bangsa mengharuskan Perguruan Tinggi, termasuk Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, untuk terus menerus meningkatkan dan mewujudkan program-program nyata dalam upaya menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan yang baik, terdidik dan terampil, turut serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang manufaktur.

Harapan pemerintah, industri dan masyarakat terhadap Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung antara lain: menyiapkan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah melalui hasil pengembangan dan pemanfaatan teknologi, serta menyiapkan teknologi tepat guna dan produk-produk teknologi yang harganya terjangkau (kompetitif).

C. Permasalahan Birokrasi

Dalam cakupan 8 (delapan) program reformasi birokrasi, permasalahan yang mendapat perhatian dalam kurun waktu tiga tahun mendatang, meliputi:

1. Manajemen Perubahan.

Semenjak ditetapkan sebagai institusi pendidikan tinggi negeri pada tahun 2010, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung telah banyak mengalami perubahan dalam hal tata kelola institusi, menyesuaikan dengan pola tata kelola pemerintahan. Namun demikian, reformasi birokrasi masih belum menjadi bagian dari agenda pengembangan institusi. Memenuhi amanat dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Polmanbabel berusaha untuk mewujudkan tata kelola institusi yang baik melalui perubahan manajemen menuju manajemen yang efektif dan efisien.

2. Pengawasan.

Satuan Pengawas Internal (SPI) dibentuk berdasarkan SK Direktur Polman Negeri Bangka Belitung No. 37/PL28/WS/2014 pada tanggal 18 Maret 2014, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan tugas di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, meliputi: a). pengawasan kebijakan dan program, b). pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, c). pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal, d). pendampingan dan review laporan keuangan, e). pemberian saran dan rekomendasi, f). penyusunan laporan hasil pengawasan dan g). Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.

Semenjak ditetapkan, SPI Polman Babel telah banyak Melakukan kegiatan audit dan reviu laporan keuangan dan Barang Milik Negara Polman Babel dan melaporkan hasil pengawasannya

kepada Direktur Polman Babel dan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Terkait dengan penguatan pengawasan, SPI Polmanbabel ikut serta dan berperan aktif untuk untuk mewujudkan agenda reformasi birokrasi. Selanjutnya, SPI Polman Babel bertugas untuk menyusun strategi penguatan pengawasan dan menyampaikan agenda tersebut kepada pemangku kepentingan di Polmanbabel melalui sosialisasi dan internalisasi penguatan pengawasan SPI.

3. Akuntabilitas Kinerja.

Hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah masalah pengukuran kinerja, khususnya indikator kinerja. Penyusunan IKU telah dilakukan sebagai ukuran kinerja formal. Upaya penyempurnaan indikator kinerja telah dilakukan, namun reviu terhadap indikator kinerja tetap perlu dilakukan secara terus menerus untuk memastikan tersedianya ukuran kinerja yang lebih relevan, terukur dan cukup untuk mempresentasikan tercapai atau tidaknya tujuan, sasaran dan juga *outcome* yang telah direncanakan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan dan penyempurnaan IKU, antara lain: Relevansi antara indikator dengan kinerja utama yang akan diwujudkan dan Penetapan target IKU perlu mempertimbangkan basis data yang memadai sehingga simpulan pengukuran menggambarkan capaian yang wajar.

4. Kelembagaan.

Untuk menciptakan birokrasi efektif dan efisien, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung harus menuntaskan berbagai macam tantangan dan permasalahan dalam segi organisasi. Secara umum, tantangan dan permasalahan organisasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung meliputi:

- a. Belum optimal pelaksanaan tugas dan fungsi sebagian unit kerja;
- b. Masih terdapat ketidakseimbangan beban kerja antar unit kerja;
- c. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit kerja; dan
- d. Belum terciptanya organisasi yang sarat fungsi.

Untuk menyelesaikan tantangan dan permasalahan yang timbul, pada program penguatan kelembagaan melakukan pendekatan dengan evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan Aparatur Sipil Negara. Diharapkan dengan adanya perubahan pada sistem kelembagaan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien dan setiap unit kerja dapat bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

5. Tata Laksana.

Penataan Tata Laksana dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tata kelola birokrasi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Selain menata prosedur standar kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, perbaikan tata kelola juga meliputi perbaikan sistem penyelenggaraan layanan pemerintahan kepada pemangku kepentingan, sehingga mampu mengungkit terjadinya reformasi layanan.

Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung saat ini belum memiliki peta proses bisnis dan Standar Operasi Prosedur (SOP) secara lengkap dari seluruh kegiatan politeknik. Peta proses bisnis dan SOP yang sudah ada dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Selain itu, perangkat tata kelola elektronik yang telah ada, belum diintegrasikan dan disesuaikan dengan proses bisnis politeknik dalam rangka mendukung reformasi layanan.

Untuk itu, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung berkewajiban menyusun peta proses bisnis hingga SOP seluruh kegiatan dan mengembangkan e-government. Perubahan pada sistem tata laksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

6. Sistem Manajemen SDM Aparatur.

Semenjak ditetapkan sebagai institusi pendidikan tinggi negeri pada tahun 2010, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung telah banyak mengalami perubahan dalam hal tata kelola institusi, menyesuaikan dengan pola tata kelola pemerintahan. Namun demikian, reformasi birokrasi masih belum menjadi bagian dari agenda pengembangan institusi. Memenuhi amanat dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Polmanbabel berusaha untuk mewujudkan tata kelola institusi yang baik khususnya dalam pengelolaan dan penatausahaan administrasi kepegawaian melalui Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

7. Peraturan Perundang-undangan.

Dengan menjadi Perguruan Tinggi Negeri baru berdampak terhadap perubahan nomenklatur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan, sehingga menuntut Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung untuk melakukan penyesuaian, perubahan, dan pembuatan peraturan pelaksana/teknis dari peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah.

8. Kualitas Pelayanan Publik.

Selain dua program utama tersebut, secara umum berbagai layanan publik di Polman Babel masih memerlukan pembenahan menyangkut hal-hal sebagai berikut: Belum semua layanan menjabarkan, menetapkan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik; Belum semua layanan menetapkan standar pelayanan dikarenakan sertifikasi ISO 9001:2008 dalam scop pendidikan; Belum semua unit kerja pelayanan publik melaksanakan pelayanan yang didukung IT; Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala; Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung; dan Kompetensi aparatur penyelenggara pelayanan publik belum optimal.

D. Upaya Mengatasi Permasalahan

Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung melakukan beberapa pendekatan dalam upaya mengatasi permasalahan sesuai koridor reformasi birokrasi, sehingga hasil yang diharapkan dapat diaplikasikan dan mendukung kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Adapun langkah-langkah pembenahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Dalam tahap awal, agenda manajemen perubahan dicapai melalui tiga aktifitas utama: Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Polman Babel; Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi; dan Sosialisasi dan Internalisasi manajemen Perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

2. Penguatan Pengawasan

Penguatan Pengawasan yang dilakukan oleh SPI Polman Babel dicapai melalui aktifitas utama, yakni: Pembentukan/penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Polman Babel; Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi; Pembentukan whistleblowing System; dan Pembuatan Layanan Pengaduan 24 jam

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan Akuntabilitas Kinerja dicapai melalui tiga aktifitas utama, yaitu: Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi; dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Polman Babel.

4. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan dapat dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: Penyesuaian rincian tugas unit kerja di lingkungan politeknik; Penyesuaian organisasi politeknik sesuai dengan perubahan kebijakan; dan Penguatan organisasi unit kerja penunjang pelaksanaan tugas politeknik.

5. Penguatan Tata Laksana

Penguatan Tata Laksana dapat dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: Penyusunan peta proses bisnis; Penyusunan SOP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang efisien; Pengembangan sistem manajemen persuratan dalam mendukung penerapan sistem kearsipan yang handal; dan Pengembangan dan pengintegrasian e-government di lingkungan politeknik.

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dicapai melalui sembilan aktifitas utama, yaitu: Penataan sistem rekrutmen pegawai; Analisis Jabatan; Evaluasi Jabatan; Penyusunan standar kompetensi jabatan; Assessment individu berdasarkan kompetensi; Penerapan sistem penilaian kerja individu; Pembangunan/pengembangan database pegawai; Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi; dan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) (aplikasi ini milik BKN)

7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Penguatan Peraturan Perundang-undangan dapat dicapai antara lain melalui kegiatan: Pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan; Penyusunan peraturan perundang-undangan; Pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan; Pengkajian dan penataan peraturan perundang-undangan; Pengembangan kompetensi perancang dan penyusun peraturan perundang-undangan; Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan; Pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan; dan Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dapat dicapai melalui kegiatan: Penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan semua layanan yang ada termasuk peraturan tentang kebijakan dan SOP pelayanan; Menciptakan budaya pelayanan prima; Pengelolaan Pengaduan; Penilaian kepuasan terhadap pelayanan; dan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam pelayanan.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI

A. Manajemen Perubahan

1. Kondisi saat ini

Semenjak ditetapkan sebagai institusi pendidikan tinggi negeri pada tahun 2010, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung telah banyak mengalami perubahan dalam hal tata kelola institusi, menyesuaikan dengan pola tata kelola pemerintahan. Namun demikian, reformasi birokrasi masih belum menjadi bagian dari agenda pengembangan institusi. Memenuhi amanat dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Polmanbabel berusaha untuk mewujudkan tata kelola institusi yang baik melalui perubahan manajemen menuju manajemen yang efektif dan efisien. Terkait dengan agenda manajemen perubahan, Manajemen Polmanbabel telah membentuk tim yang bertanggung jawab untuk mewujudkan agenda reformasi birokrasi. Selanjutnya, tim manajemen perubahan bertugas untuk menyusun strategi manajemen perubahan dan menyampaikan agenda tersebut kepada pemangku kepentingan di Polmanbabel melalui sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan.

2. Rencana program dan aktifitas

Dalam tahap awal, agenda manajemen perubahan dicapai melalui tiga aktifitas utama:

- a. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Polman Babel
- b. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi
- c. Sosialisasi dan Internalisasi manajemen Perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

3. Kriteria keberhasilan (lihat di tabel)

Keberhasilan dari agenda perubahan manajemen di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dapat dilihat dari keluaran (output) dan hasil (outcome) berikut:

Keluaran (Output)

- a. Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan
- b. Tersedianya dokumen strategis manajemen perubahan dan strategi komunikasi
- c. Terselenggaranya Sosialisasi dan Internalisasi manajemen Perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

Hasil (Outcome)

Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai.

Indikator *outcome* untuk mengukur area perubahan ini adalah Indeks Capaian Reformasi Birokrasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dengan target-target per tahun sebagai berikut:

Tahun	2017	2018	2019
Indeks Capaian	30%	60%	90%

4. Agenda Prioritas

Agenda prioritas yang menjadi kegiatan program Manajemen Perubahan, meliputi:

- a. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Polman Babel
- b. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi

- c. Sosialisasi dan Internalisasi manajemen Perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Program dan aktifitas yang ditujukan untuk membentuk birokrasi yang efektif dan efisien di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dilaksanakan secara berkelanjutan dimulai dari semenjak agenda ditetapkan oleh Manajemen Polmanbabel, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja rencana aksi program Manajemen Perubahan untuk tahun 2017 sampai dengan 2019, sebagai berikut:

Kegiatan dan Tahapan Kerja	Waktu
1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan	
a. Identifikasi tugas dan fungsi tim manajemen perubahan	April 2017
b. Perancangan tugas, fungsi, dan susunan organisasi tim manajemen perubahan	Mei 2017
c. Pembentukan tim manajemen perubahan	Mei 2017
2. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi	
a. Pengembangan budaya kerja dan nilai organisasi	Juni – Desember 2017
b. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi reformasi birokrasi	Januari – Mei 2018
3. Sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi	
a. Pembentukan agen perubahan	Januari 2018
b. Sosialisasi dan internalisasi budaya kerja dan nilai organisasi	Februari 2018 – Desember 2019
c. Sosialisasi sistem informasi dan komunikasi reformasi birokrasi	Juni 2018
d. Evaluasi kinerja manajemen perubahan	November – Desember 2018
e. Mengimplementasikan tindakan perbaikan dan membuat langkah tindak lanjut	Januari – Desember 2019

6. Penanggungjawab

Penanggung jawab program manajemen perubahan ini adalah Kepala Unit Pengembangan Institusi dan Kerjasama.

7. Rencana Anggaran

Rencana anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana aksi program Manajemen Perubahan dari tahun 2017 sampai 2019, sebesar:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pembentukan Tim Manajemen Perubahan	5.000.000
2	Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi	50.000.000
3	Sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi	50.000.000
Total		105.000.000

B. Penguatan Sistem Pengawasan

1. Kondisi saat ini

Satuan Pengawas Internal (SPI) dibentuk berdasarkan SK Direktur Polman Negeri Bangka Belitung No. 37/PL28/WS/2014 pada tanggal 18 Maret 2014, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan tugas di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, meliputi: a). pengawasan kebijakan dan program, b). pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, c). pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal, d). pendampingan dan review laporan keuangan, e). pemberian saran dan rekomendasi, f). penyusunan laporan hasil pengawasan dan g). Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.

Semenjak ditetapkan, SPI Polman Babel telah banyak Melakukan kegiatan audit dan reviu laporan keuangan dan Barang Milik Negara Polman Babel dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Direktur Polman Babel dan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Terkait dengan penguatan pengawasan, SPI Polmanbabel ikut serta dan berperan aktif untuk untuk mewujudkan agenda reformasi birokrasi. Selanjutnya, SPI Polman Babel bertugas untuk menyusun strategi penguatan pengawasan dan menyampaikan agenda tersebut kepada pemangku kepentingan di Polmanbabel melalui sosialisasi dan internalisasi penguatan pengawasan SPI.

2. Rencana program dan aktifitas

Dalam tahap awal, agenda Penguatan Pengawasan yang dilakukan oleh SPI Polman Babel dicapai melalui aktifitas utama, yakni:

- a. Pembentukan/penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Polman Babel
- b. Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi
- c. Pembentukan whistleblowing System
- d. Pembuatan Layanan Pengaduan 24 jam

3. Kriteria keberhasilan

Keberhasilan dari agenda perubahan manajemen di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dapat dilihat dari keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) berikut:

Keluaran (Output)

- a. Terbentuknya WBK/WBBM
- b. Terbentuknya tim pengendali gratifikasi
- c. Terbentuknya whistleblowing System
- d. Terbentuknya layanan pengaduan 24 jam

Hasil (Outcome)

Terbangunnya penguatan pengawasan di Polman Negeri Bangka Belitung yang memiliki kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai.

Indikator *outcome* untuk mengukur area perubahan ini adalah Indeks Capaian Reformasi Birokrasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dengan target-target per tahun sebagai berikut:

Tahun	2017	2018	2019
Indeks Capaian	30%	60%	90%

4. Agenda Prioritas

Agenda prioritas yang menjadi kegiatan program Penguatan Pengawasan, meliputi:

- Pembentukan/penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Polman Babel
- Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi
- Pembentukan whistleblowing System
- Pembuatan Layanan Pengaduan 24 jam

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Program dan aktifitas yang ditujukan untuk membentuk birokrasi yang efektif dan efisien di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dilaksanakan secara berkelanjutan dimulai dari semenjak agenda ditetapkan oleh Manajemen Polmanbabel, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja rencana aksi program Penguatan Pengawasan untuk tahun 2017 sampai dengan 2019, sebagai berikut:

Kegiatan dan Tahapan Kerja	Waktu
1. Pembentukan/penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	
a. Pembentukan tim	April-Mei 2017
b. Pembangunan WBK/WBBM	Juni – Oktober 2017
c. Sosialisasi WBK/WBBM	November – Desember 2017
d. Implementasi WBK/WBBM	Januari 2018 – Des 2019
e. Evaluasi dan perbaikan	Desember 2018
2. Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi	
a. Pembentukan tim	Februari 2018
b. Penetapan unit Pengendali Gratifikasi	Maret – Mei 2018
c. Sosialisasi unit Pengendali Gratifikasi	Juni 2018
d. Implementasi Pengendalian Gratifikasi	Juli 2018 – Des 2019
e. Evaluasi dan perbaikan	Desember 2018
3. Pembentukan whistleblowing System	
a. Pembentukan tim	Agustus 2018
b. Penetapan unit pengelola whistleblowing System	September- November 2018
c. Sosialisasi whistleblowing System	Desember 2018
d. Implementasi whistleblowing System	Januari – Desember 2019
e. Evaluasi dan perbaikan	Desember 2019
4. Pembuatan Layanan Pengaduan 24 jam	
a. Pembentukan tim	Maret 2019
b. Penetapan unit pengelola Layanan Pengaduan 24 jam	April – Juni 2019
c. Sosialisasi Layanan Pengaduan 24	Juli 2019
d. Implementasi Layanan Pengaduan 24	Agustus – Desember 2019
e. Evaluasi dan perbaikan	Desember 2019

6. Penanggungjawab

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Kepala Satuan Pengawasan Internal Polman Babel.

7. Rencana Anggaran

Rencana anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana aksi program Penguatan Pengawasan dari tahun 2017 sampai 2019, sebesar:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pembentukan/penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	30.000.000
2	Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi	15.000.000
3	Pembentukan whistleblowing System	15.000.000
4	Pembuatan Layanan Pengaduan 24 jam	20.000.000
Total		80.000.000

C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Kondisi saat ini

Akuntabilitas Kinerja yang sudah dilakukan Polmanbabel hingga saat ini dimulai dengan penetapan Perjanjian Kinerja antara Direktur Polmanbabel dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja ini memuat Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan Polmanbabel untuk:

- Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Menilai keberhasilan organisasi.

Untuk mendukung capaian target Perjanjian Kinerja antara Direktur Polmanbabel dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tersebut maka dibuatkan dokumen Perjanjian Kinerja antara Direktur Polmanbabel dengan semua Unit Kerja yang ada di Polmanbabel. Masing-masing Unit Kerja menetapkan agenda kegiatan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan bidang masing-masing.

Setiap akhir periode tahun berjalan Polmanbabel melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja ini dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

2. Rencana program dan aktifitas

Rencana program Akuntabilitas Kinerja dicapai melalui tiga aktifitas utama, yaitu:

- Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi
- Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Polman Babel

3. Kriteria keberhasilan

Keberhasilan dari agenda perubahan manajemen di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dapat dilihat dari keluaran (output) dan hasil (outcome) berikut:

Keluaran (Output)

- Terjadinya peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja
- Terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
- Tersusunnya IKU

Hasil (Outcome)

Berjalannya sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif.

Indikator *outcome* untuk mengukur area perubahan ini adalah Indeks Capaian Reformasi Birokrasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dengan target-target per tahun sebagai berikut:

Tahun	2017	2018	2019
Indeks Capaian	30%	60%	90%

4. Agenda Prioritas

Agenda prioritas yang menjadi kegiatan program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, meliputi:

- Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi
- Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Polman Babel

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Program dan aktifitas yang ditujukan untuk membentuk birokrasi yang efektif dan efisien di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dilaksanakan secara berkelanjutan dimulai dari semenjak agenda ditetapkan oleh Manajemen Polmanbabel, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja rencana aksi program Penguatan Akuntabilitas Kinerja untuk tahun 2017 sampai dengan 2019, sebagai berikut:

Kegiatan dan Tahapan Kerja	Waktu
1. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	
a. Perencanaan	Juli - September 2017
b. Pelaksanaan	Oktober 2017 – Des 2019
c. Monitoring dan Evaluasi	Januari 2018 – Des 2019
d. Perbaikan dan tindak lanjut	Januari 2018 – Des 2019
2. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi	
a. Perencanaan	Januari – Maret 2018
b. Pelaksanaan	April 2018 – Desember 2019
c. Monitoring dan Evaluasi	April 2018 – Desember 2019
d. Perbaikan dan tindak lanjut	April 2018 – Desember 2019
3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Polman Babel	
a. Perencanaan	April – Mei 2017
b. Pelaksanaan	April – Mei 2017
c. Evaluasi dan perbaikan	Juni 2017

6. Penanggungjawab

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama Polman Babel, Muhammad Subhan.

7. Rencana Anggaran

Rencana anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana aksi program Akuntabilitas Kinerja dari tahun 2017 sampai 2019, sebesar:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	20.000.000
2	Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi	30.000.000
3	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Polman Babel	15.000.000
Total		65.000.000

D. Penguatan Kelembagaan

1. Kondisi saat ini

Untuk menciptakan birokrasi efektif dan efisien, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung harus menuntaskan berbagai macam tantangan dan permasalahan dalam segi organisasi. Secara umum, tantangan dan permasalahan organisasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung meliputi:

- a. Belum optimal pelaksanaan tugas dan fungsi sebagian unit kerja;
- b. Masih terdapat ketidakseimbangan beban kerja antar unit kerja;
- c. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit kerja; dan
- d. Belum terciptanya organisasi yang sarat fungsi.

Untuk menyelesaikan tantangan dan permasalahan yang timbul, pada program penguatan kelembagaan melakukan pendekatan dengan evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan Aparatur Sipil Negara. Diharapkan dengan adanya perubahan pada sistem kelembagaan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien dan setiap unit kerja dapat bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

2. Rencana program dan aktifitas

Penguatan kelembagaan dapat dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian rincian tugas unit kerja di lingkungan politeknik
- b. Penyesuaian organisasi politeknik sesuai dengan perubahan kebijakan.
- c. Penguatan organisasi unit kerja penunjang pelaksanaan tugas politeknik.

3. Kriteria keberhasilan

Keberhasilan dari pelaksanaan rencana aksi program Penguatan Kelembagaan, diukur dengan kriteria berikut:

- a. Tersedianya konsep rincian tugas unit kerja di lingkungan politeknik sesuai tugas dan fungsi unit kerja.
- b. Tersusunnya konsep Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- c. Tersusunnya konsep Organisasi dan Tata Kerja unit kerja penunjang sesuai kebutuhan Politeknik.

Indikator outcome untuk mengukur area perubahan ini adalah Indeks Capaian Reformasi Birokrasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dengan target-target per tahun sebagai berikut:

Tahun	2017	2018	2019
Indeks Capaian	30%	60%	90%

4. Agenda Prioritas

Pelaksanaan rencana aksi program Penguatan Kelembagaan akan memprioritaskan kegiatan pada rencana aksi berikut:

- a. Penyesuaian rincian tugas unit kerja di lingkungan politeknik
- b. Penyesuaian organisasi politeknik sesuai dengan perubahan kebijakan.
- c. Penguatan organisasi unit kerja penunjang pelaksanaan tugas politeknik.

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Pelaksanaan rencana aksi program Penguatan Kelembagaan direncanakan berlangsung sampai tahun 2019. Agar pelaksanaan rencana aksi dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan, maka disusun tahapan kerja rencana aksi beserta waktu pelaksanaannya. Adapun tahapan kerja dan waktu pelaksanaan rencana aksi dijabarkan dalam tabel berikut:

Kegiatan dan Tahapan Kerja	Waktu
1. Penyesuaian rincian tugas unit kerja di lingkungan politeknik	
a. Melakukan identifikasi atas penjabaran tugas dan fungsi unit kerja	April 2017
b. Penyusunan konsep rincian tugas unit kerja	Mei-Juli 2017
c. Sosialisasi rincian tugas unit kerja	Agustus 2017
d. Pelaksanaan rincian tugas unit kerja	September 2017 – Des 2019
e. Pemantauan dan evaluasi atas rincian tugas unit kerja	Januari 2018 – Des 2019
2. Penyesuaian organisasi politeknik sesuai dengan perubahan kebijakan	
a. Melakukan evaluasi organisasi dan pemetaan/identifikasi program/kegiatan sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi politeknik	Januari – April 2018
b. Penyusunan konsep tugas, fungsi, dan struktur organisasi politeknik sesuai dengan perubahan kebijakan	Mei – November 2018
c. Sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur organisasi politeknik sesuai dengan perubahan kebijakan	Desember 2018
d. Pelaksanaan tugas dan fungsi politeknik	Januari– Desember 2019
e. Pemantauan dan evaluasi kinerja tugas dan fungsi serta struktur organisasi politeknik	Januari– Desember 2019
3. Penguatan organisasi unit kerja penunjang pelaksanaan tugas politeknik	
a. Melakukan evaluasi organisasi dan pemetaan/identifikasi program/kegiatan sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi unit kerja	Januari – Maret 2019
b. Penyusunan konsep tugas, fungsi, dan struktur organisasi unit kerja	April – Juni 2019
c. Sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur organisasi unit kerja	Juli 2019
d. Pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja	Agustus – Desember 2019
e. Pemantauan dan evaluasi kinerja tugas dan fungsi serta struktur organisasi unit kerja	Agustus – Desember 2019

6. Penanggungjawab

Penanggung jawab dari kegiatan Penguatan Kelembagaan adalah Pembantu Direktur II.

7. Rencana Anggaran

Rencana anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana aksi program Penguatan Kelembagaan dari tahun 2017 sampai 2019, sebesar:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penyesuaian rincian tugas unit kerja di lingkungan politeknik	20.000.000
2	Penyesuaian organisasi politeknik sesuai dengan perubahan kebijakan	50.000.000
3	Penguatan organisasi unit kerja penunjang pelaksanaan tugas politeknik	30.000.000
Total		100.000.000

E. Penguatan Tata Laksana

1. Kondisi saat ini

Penataan Tata Laksana dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tata kelola birokrasi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Selain menata prosedur standar kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, perbaikan tata kelola juga meliputi perbaikan sistem penyelenggaraan layanan pemerintahan kepada pemangku kepentingan, sehingga mampu mengungkit terjadinya reformasi layanan.

Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung saat ini belum memiliki peta proses bisnis dan Standar Operasi Prosedur (SOP) secara lengkap dari seluruh kegiatan politeknik. Peta proses bisnis dan SOP yang sudah ada dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Selain itu, perangkat tata kelola elektronik yang telah ada, belum diintegrasikan dan disesuaikan dengan proses bisnis politeknik dalam rangka mendukung reformasi layanan.

Untuk itu, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung berkewajiban menyusun peta proses bisnis hingga SOP seluruh kegiatan dan mengembangkan e-government. Perubahan pada sistem tata laksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

2. Rencana program dan aktifitas

Penguatan Tata Laksana dapat dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan peta proses bisnis
- Penyusunan SOP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang efisien.
- Pengembangan sistem manajemen persuratan dalam mendukung penerapan sistem kearsipan yang handal.
- Pengembangan dan pengintegrasian e-government di lingkungan politeknik.

3. Kriteria keberhasilan

Keberhasilan dari pelaksanaan rencana aksi program Penguatan Tata Laksana, diukur dengan kriteria berikut:

- Terciptanya tata layanan unit kerja melalui tersusunnya peta proses bisnis dan SOP politeknik.
- Tersedianya sistem manajemen persuratan dalam mendukung penerapan sistem kearsipan yang handal.
- Tersedia dan terintegrasinya e-government yang ada di lingkungan politeknik.

Indikator outcome untuk mengukur area perubahan ini adalah Indeks Capaian Reformasi Birokrasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dengan target-target per tahun sebagai berikut:

Tahun	2017	2018	2019
Indeks Capaian	30%	60%	90%

4. Agenda Prioritas

Pelaksanaan rencana aksi program Penguatan Kelembagaan akan memprioritaskan kegiatan pada rencana aksi berikut:

- Penyusunan peta proses bisnis.
- Penyusunan SOP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang efisien.
- Pengembangan sistem manajemen persuratan dan kearsipan.
- Pengembangan dan pengintegrasian e-government di lingkungan politeknik.

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Pelaksanaan rencana aksi program Penguatan Kelembagaan direncanakan berlangsung sampai tahun 2019. Agar pelaksanaan rencana aksi dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka disusun tahapan kerja rencana aksi beserta waktu pelaksanaannya. Adapun tahapan kerja dan waktu pelaksanaan rencana aksi dijabarkan dalam tabel berikut:

Kegiatan dan Tahapan Kerja	Waktu
1. Penyusunan peta proses bisnis	
a. Pembentukan Tim Penyusun Proses Bisnis	April 2017
b. Penyusunan peta proses bisnis	Mei-Juli 2017
c. Sosialisasi peta proses bisnis	Agustus 2017
d. Implementasi peta proses bisnis	September 2017 – Des 2019
e. Evaluasi dan perbaikan peta proses bisnis	Januari 2018 – Des 2019
2. Penyusunan SOP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang efisien	
f. Sosialisasi tentang peraturan penyusunan SOP	Januari – April 2018
g. Identifikasi SOP yang telah ada dan yang belum ada saat ini.	Mei – November 2018
h. Penyusunan SOP berdasarkan peta proses bisnis	Desember 2018
i. Sosialisasi SOP kepada pegawai	Januari– Desember 2019
j. Implementasi SOP	Januari– Desember 2019
k. Evaluasi dan perbaikan SOP	
3. Pengembangan sistem manajemen persuratan dan kearsipan	
l. Identifikasi kondisi layanan kearsipan dan evaluasi SOP layanan persuratan dan kearsipan saat ini	Januari – April 2018
a. Pembangunan dan pengembangan sistem persuratan dan kearsipan berbasis TIK	Mei – November 2018
b. Sosialisasi sistem persuratan dan kearsipan berbasis TIK	Desember 2018
c. Implementasi sistem persuratan dan kearsipan berbasis TIK	Januari– Desember 2019
d. Evaluasi dan perbaikan sistem kearsipan TIK	Januari– Desember 2019
4. Pengembangan dan pengintegrasian e-government di lingkungan politeknik	
a. Identifikasi layanan/e-government di seluruh unit kerja	Januari – Maret 2019
b. Identifikasi layanan di seluruh unit kerja yang belum berbasis TIK	April – Juni 2019
c. Pembangunan dan pengembangan layanan berbasis TIK	Juli 2019
d. Integrasi e-government di seluruh unit kerja	Agustus – September 2019
e. Sosialisasi layanan/e-government yang terintegrasi dan sistem layanan/e-government baru	September 2019
f. Implementasi layanan/e-government yang terintegrasi dan sistem layanan/e-government baru	September – Desember 2019
g. Evaluasi dan perbaikan sistem layanan/e-government	Desember 2019

6. Penanggungjawab

Penanggung jawab dari kegiatan Penguatan Kelembagaan adalah Ka. UPT Penjaminan Mutu.

7. Rencana Anggaran

Rencana anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana aksi program Penguatan Tata Laksana dari tahun 2017 sampai 2019, sebesar:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penyusunan peta proses bisnis	10.000.000
2	Penyusunan SOP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang efisien	30.000.000
3	Pengembangan sistem manajemen persuratan dan kearsipan	50.000.000
4	Pengembangan dan pengintegrasian e-government di lingkungan politeknik	300.000.000
Total		380.000.000

F. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

1. Kondisi saat ini

Semenjak ditetapkan sebagai institusi pendidikan tinggi negeri pada tahun 2010, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung telah banyak mengalami perubahan dalam hal tata kelola institusi, menyesuaikan dengan pola tata kelola pemerintahan. Namun demikian, reformasi birokrasi masih belum menjadi bagian dari agenda pengembangan institusi. Memenuhi amanat dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Polmanbabel berusaha untuk mewujudkan tata kelola institusi yang baik khususnya dalam pengelolaan dan penatausahaan administrasi kepegawaian melalui Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pada tahun 2017 susunan Sumber Daya Manusia di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung terdiri dari 29 orang PNS/CPNS dan 100 orang Pegawai Non PNS. Tingkat pendidikan pegawai sebagai berikut: 2 orang pendidikan S3, 38 orang pendidikan S2, 45 orang pendidikan S1/D4, 13 orang pendidikan D3, 1 orang pendidikan D2, dan 30 orang pendidikan SLTA. Pada saat ini tercatat pegawai yang sedang studi lanjut sebagai berikut: 4 orang pada tingkat pendidikan S3, 17 orang pada tingkat pendidikan S2 dan 5 orang pada tingkat pendidikan S1/D4.

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi pemerintah, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal.

Oleh karena itu pula dalam Reformasi Birokrasi Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Memperhatikan kebijakan tentang Reformasi Birokrasi, perkembangan konsep dan praktek manajemen SDM saat ini serta adanya kebutuhan untuk menyelaraskan manajemen SDM dengan Rencana Strategi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, maka perlu dilakukannya penataan sistem manajemen SDM Aparatur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

Penataan Sistem Manajemen SDM Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung bertujuan untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan filosofi, prinsip, komponen, metode,

instrumen, dan sistem informasi manajemen kepegawaian selaras dengan sasaran dalam sasaran strategi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung sehingga mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja SDM Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah terbangunnya dan diaplikasikannya sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang selaras dengan Rencana Strategi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional.

Adapun ruang lingkup Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur mencakup seluruh dimensi dalam manajemen SDM, mulai dari Perencanaan SDM, manajemen kompetensi, sistem rekrutmen, penilaian kinerja, sistem kompensasi/remunerasi hingga sistem informasi manajemen SDM.

2. Rencana program dan aktifitas

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dicapai melalui sembilan aktifitas utama, yaitu:

- a. Penataan sistem rekrutmen pegawai
- b. Analisis Jabatan
- c. Evaluasi Jabatan
- d. Penyusunan standar kompetensi jabatan
- e. Assessment individu berdasarkan kompetensi
- f. Penerapan sistem penilaian kerja individu
- g. Pembangunan/pengembangan database pegawai
- h. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi
- i. Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) (aplikasi ini milik BKN)

3. Kriteria keberhasilan

Keberhasilan dari agenda Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dapat dilihat dari keluaran (output) dan hasil (outcome) berikut:

Keluaran (Output)

- a. Terbangunnya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi
- b. Tersedianya uraian jabatan
- c. Tersedianya peringkat jabatan
- d. Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan
- e. Tersedianya peta profil kompetensi individu (GAP Kompetensi)
- f. Tersedianya indikator kinerja individu yang terukur
- g. Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat
- h. Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai yang berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
- i. Terlaksananya kenaikan pangkat, data pegawai, pengadaan PNS, statistik pegawai, Editing Unit Organisasi secara online

Hasil (Outcome)

- a. Diperolehnya para pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan
- b. Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

- c. Terwujudnya profil kompetensi untuk masing-masing jabatan dalam organisasi dan tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat profil kompetensi individu
- d. Terlaksananya program pengembangan pegawai melalui pendidikan lanjut atau pendidikan singkat.
- e. Terwujudnya sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif, transparan dan akuntabel
- f. Berjalannya sistem informasi pegawai yang akurat, transparan dan akuntabel
- g. Berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan pegawai yang mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan.

Indikator *outcome* untuk mengukur area perubahan ini adalah Indeks Capaian Reformasi Birokrasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dengan target-target per tahun sebagai berikut:

Tahun	2017	2018	2019
Indeks Capaian	30%	60%	90%

4. Agenda Prioritas

Agenda prioritas yang menjadi kegiatan program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, meliputi:

- a. Penataan sistem rekrutmen pegawai
- b. Analisis Jabatan
- c. Evaluasi Jabatan
- d. Penyusunan standar kompetensi jabatan
- e. Assessment individu berdasarkan kompetensi
- f. Penerapan sistem penilaian kerja individu
- g. Pembangunan/pengembangan database pegawai
- h. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi
- i. Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) (aplikasi ini milik BKN)

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Program dan aktifitas yang ditujukan untuk membentuk birokrasi yang efektif dan efisien di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dilaksanakan secara berkelanjutan dimulai dari semenjak agenda ditetapkan oleh Manajemen Polmanbabel, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja rencana aksi program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur untuk tahun 2017 sampai dengan 2019, sebagai berikut:

Kegiatan dan Tahapan Kerja	Waktu
1. Penataan sistem rekrutmen pegawai	
a. Identifikasi Peraturan tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil	April – Juli 2017
b. Penyusunan pedoman tentang perekrutan pegawai	April – Juli 2017
c. Implementasi perekrutan pegawai	April – Desember 2019
d. Evaluasi dan perbaikan pedoman perekrutan pegawai	Desember 2018
2. Analisis Jabatan	
a. Identifikasi Peraturan tentang Analisa jabatan	Januari – Desember 2018
b. Menyusun uraian jabatan dan beban kerja	Januari – Desember 2018

c. Implementasi dan evaluasi serta updating uraian jabatan dan beban kerja	Januari – Desember 2019
d. Evaluasi dan perbaikan uraian jabatan dan beban kerja	Januari – Desember 2018
3. Evaluasi Jabatan	
a. Identifikasi Peraturan tentang evaluasi jabatan	Januari – Desember 2018
b. Menyusun peringkat jabatan dan informasi faktor jabatan	Januari – Desember 2018
c. Implementasi hasil evaluasi jabatan	Januari – Desember 2019
d. Evaluasi dan perbaikan peringkat dan informasi faktor jabatan	Januari – Desember 2019
4. Penyusunan standar kompetensi jabatan	
a. Identifikasi Peraturan tentang Kompetensi jabatan	Januari – Desember 2018
b. Membuat standar kompetensi jabatan	Januari – Desember 2018
c. Implementasi standar kompetensi jabatan	Januari – Desember 2019
d. Evaluasi dan perbaikan standar kompetensi jabatan	Januari – Desember 2019
5. Assessment individu berdasarkan kompetensi	
a. Pembentukan Tim Baperjakat	Januari – Desember 2018
b. Pelaksanaan pembinaan pegawai	Januari – Desember 2018
c. Pelaksanaan assessment individu pegawai	Januari – Desember 2019
d. Evaluasi dan perbaikan assesmen individu pegawai	Januari – Desember 2019
6. Penerapan sistem penilaian kerja individu	
a. Identifikasi peraturan tentang system penilaian kerja individu	Januari – Desember 2018
b. Penyusunan pedoman standar penilaian sasaran kerja pegawai	Januari – Desember 2018
c. Implementasi pedoman standar penilaian sasaran kerja pegawai	Januari – Desember 2019
d. Evaluasi dan perbaikan pedoman standar penilaian sasaran kerja pegawai	Januari – Desember 2019
7. Pembangunan/pengembangan database pegawai	
a. Peningkatan Kapasitas Simpeg	Januari – Desember 2018
b. Implementasi Simpeg dan pemuktahiran data pegawai	Januari – Desember 2019
8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi	
a. Identifikasi kebutuhan dan kompetensi pegawai saat ini	Januari – Desember 2018
b. Penyusunan sistem pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi	Januari – Desember 2018
c. Implementasi pengembangan dan pendidikan pegawai	Januari – Desember 2019
d. Evaluasi dan perbaikan sistem pengembangan dan pendidikan pegawai	Januari – Desember 2019
9. Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	
a. Penyusunan pedoman pelaksanaan SAPK	Januari – Desember 2018

b. Penyiapan SDM pelaksanaan SAPK	Januari – Desember 2018
c. Penyiapan infrastruktur SAPK	Januari – Desember 2019
d. Pelaksanaan SAPK	Januari – Desember 2019
e. Evaluasi dan perbaikan pelaksanaan SAPK	Januari – Desember 2019

6. Penanggungjawab

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

7. Rencana Anggaran

Rencana anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana aksi program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dari tahun 2017 sampai 2019, sebesar:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penataan sistem rekrutmen pegawai	71.301.000
2	Analisis Jabatan	74.208.000
3	Evaluasi Jabatan	74.208.000
4	Penyusunan standar kompetensi jabatan	97.558.000
5	Assessment individu berdasarkan kompetensi	104.851.000
6	Penerapan sistem penilaian kerja individu	91.551.000
7	Pembangunan/pengembangan database pegawai	132.151.000
8	Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi	97.558.000
Total		743.386.000

G. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

1. Kondisi saat ini

Dengan menjadi Perguruan Tinggi Negeri baru berdampak terhadap perubahan nomenklatur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan, sehingga menuntut Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung untuk melakukan penyesuaian, perubahan, dan pembuatan peraturan pelaksana/teknis dari peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah.

Penyesuaian, perubahan, dan pembentukan peraturan pelaksana/teknis dilakukan karena adanya permasalahan dalam peraturan yang harus diselesaikan, yaitu:

- Masih ada peraturan yang tidak harmonis dan/atau tumpang tindih (overlapping) dengan peraturan sewaktu masih berstatus swasta, atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah;
- Masih ada peraturan yang diterbitkan pemerintah/kementerian yang belum bisa dilaksanakan karena belum memiliki peraturan pelaksana/teknis.
- Sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan masih terbatas;
- Tenaga penyusun peraturan tidak terpenuhi secara kompetensi, hal ini disebabkan karena belum seluruhnya SDM yang ada mengikuti diklat perancang peraturan.

2. Rencana program dan aktifitas

Rencana aksi program Penataan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- Penyusunan peraturan perundang-undangan;
- Pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- Pengkajian dan penataan peraturan perundang-undangan;

- e. Pengembangan kompetensi perancang dan penyusun peraturan perundang-undangan;
- f. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- g. Pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan; dan
- h. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

3. Kriteria keberhasilan

Keberhasilan dari agenda Penataan Peraturan Perundang-undangan di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dapat dilihat dari keluaran (output) dan hasil (outcome) berikut:

Keluaran (Output)

- a. Teridentifikasinya Peraturan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- b. Tersedianya peta peraturan yang tidak harmonis atau tidak sinkron
- c. Terlaksananya regulasi dan deregulasi peraturan

Hasil (Outcome)

Tersedianya peraturan yang akuntabel, harmonis, sinkron dan pelaksanaannya yang efektif dan efisien.

Indikator *outcome* untuk mengukur area perubahan ini adalah Indeks Capaian Reformasi Birokrasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dengan target-target per tahun sebagai berikut:

Tahun	2017	2018	2019
Indeks Capaian	30%	70%	90%

4. Agenda Prioritas

Agenda prioritas yang menjadi kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

- a. Pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkajian dan penataan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengembangan kompetensi perancang dan penyusun peraturan perundang-undangan;
- f. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- g. Pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan; dan
- h. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Program dan aktifitas yang ditujukan untuk membentuk birokrasi yang efektif dan efisien di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dilaksanakan secara berkelanjutan dimulai dari semenjak agenda ditetapkan oleh Manajemen Polmanbabel, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja rencana aksi program Penataan Peraturan Perundang-undangan untuk tahun 2017 sampai dengan 2019, sebagai berikut:

Kegiatan dan Tahapan Kerja	Waktu
1. Pemetaan dan evaluasi peraturan	
a. Pembentukan tim	April – Mei 2017
b. Inventarisasi dan identifikasi peraturan direktur	April – Mei 2017

c. Evaluasi peraturan direktur	April – Mei 2017
2. Penyusunan peraturan	
a. Pembentukan tim	Juni – Juli 2017
b. Pengembangan prosedur penyusunan peraturan direktur dan keputusan direktur	Juni – Juli 2017
c. Penyusunan rancangan peraturan direktur dan keputusan direktur	Agustus 2017 – Des 2019
d. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan direktur dan keputusan direktur	Agustus 2017 – Des 2019
e. Sosialisasi peraturan direktur	Agustus 2017 – Des 2019
f. Implementasi peraturan direktur	Agustus 2017 – Des 2019
3. Pengendalian penyusunan peraturan	
a. Pembentukan tim	September - Oktober 2017
b. Pengembangan prosedur pengendalian penyusunan peraturan	September - Oktober 2017
c. Pelaksanaan pemantauan penyusunan peraturan direktur	November 2017 – Des 2019
d. Evaluasi dan perbaikan	Desember 2017
4. Pengkajian dan penataan peraturan	
a. Pembentukan tim	Januari – Maret 2018
b. Pengembangan prosedur pengkajian dan penataan peraturan	Januari – Maret 2018
c. Pengkajian peraturan direktur	April 2018 – Desember 2019
d. Penataan peraturan direktur	April 2018 – Desember 2019
e. Evaluasi dan perbaikan	Desember 2018
5. Pengembangan kompetensi perancang dan penyusun peraturan	
a. Pendataan pegawai perancang/penyusun peraturan	Juni – Juli 2017
b. Pengembangan kompetensi perancang dan penyusun peraturan	Juli – November 2017
c. Evaluasi	Desember 2018
6. Sosialisasi peraturan yang telah ditetapkan	
a. Sosialisasi peraturan yang telah ditetapkan	Agustus 2017 – Des 2019
b. Evaluasi	Desember 2017
7. Pendokumentasian dan publikasi peraturan	
a. Pembentukan tim	April – Juni 2018
b. Pengembangan prosedur pendokumentasian dan publikasi peraturan	April – Juni 2018
c. Implementasi pendokumentasian dan publikasi peraturan	Juli 2018 – Desember 2019
d. Evaluasi dan perbaikan	Desember 2018
8. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan	
a. Pembentukan tim	Januari – Mei 2019
b. Pengembangan sistem informasi dan dokumentasi peraturan berbasis TIK	Januari – Mei 2019
c. Implementasi sistem informasi dan dokumentasi peraturan berbasis TIK	Juni – Desember 2019
d. Evaluasi dan perbaikan	Desember 2019

6. Penanggungjawab

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Penyusun Peraturan Perundang-undangan Polman Babel.

7. Rencana Anggaran

Rencana anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana aksi program Penataan Peraturan Perundang-undangan dari tahun 2017 sampai 2019, sebesar:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan	5.000.000
2	Penyusunan peraturan perundang-undangan	10.000.000
3	Pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	5.000.000
4	Pengkajian dan penataan peraturan perundang-undangan	5.000.000
5	Pengembangan kompetensi perancang dan penyusun peraturan perundang-undangan	20.000.000
6	Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan	5.000.000
7	Pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan	10.000.000
8	Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan	20.000.000
Total		80.000.000

H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Kondisi saat ini

Pelayanan publik merupakan ujung tombak pelaksanaan reformasi birokrasi. Semenjak ditetapkan sebagai institusi pendidikan tinggi negeri pada tahun 2010, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung meningkatkan kinerjanya dalam memuaskan pelayanan baik terhadap mahasiswa maupun antar sesama unit kerja.

Salah satu peningkatan yang dilakukan adalah adanya sistem pendaftaran secara online bagi calon mahasiswa baru yang akan mendaftar ke Polman Babel. Pendaftaran dapat dilakukan melalui website <http://polman-babel.ac.id/penerimaan/form-pendaftaran.html>.

The image shows two side-by-side screenshots. The left screenshot is the Polman Babel website homepage, featuring the college's logo, navigation menu, and various news and program listings. The right screenshot is the 'FORM PENDAFTARAN PMB' (PMB Registration Form) page, which includes a header with navigation links, a date stamp 'RABU, 29 MARET 2017, 14:08:05', and a main section titled 'Isi Formulir Pendaftaran Dengan Baik dan Benar'. The form contains fields for 'KODE: PMB' and 'NO PENDAFTARAN: P30001', a 'PILIHAN PROGRAM STUDI' section with dropdown menus for 'Jalur Pendaftaran', 'Pilih Asal Jurusan Sekolah', and 'Jurusan Yang Dilihat', and buttons for 'LAINNYA' and 'KIRIM'.

Pada tahun-tahun sebelumnya, proses pendaftaran mahasiswa baru masih secara manual, sehingga Polman Babel harus menjemput bola ke SMA/SMK yang ada di Kepulauan Bangka Belitung untuk sosialisasi dan memberikan formulir pendaftaran. Dengan adanya sistem pendaftaran online, calon mahasiswa tidak harus mendaftar ke Polman Babel atau tempat-tempat yang telah ditunjuk, tapi bisa secara online dengan harapan jumlah pendaftar yang akan kuliah ke polman Babel meningkat.

Selain itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan, pada tahun 2012 Polman Babel sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001: 2008 dengan ruang lingkup pendidikan yang di kelola oleh Unit Penjaminan Mutu Polman Babel agar setiap unit kerja yang ada di Polman Babel memiliki standar mutu dalam pelayanan. Pada tahun 2017 ini, Polman Babel akan meng-upgrade ISO 9001: 2008 menjadi ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Selain dua program utama tersebut, secara umum berbagai layanan publik di Polman Babel masih memerlukan pembenahan menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. Belum semua layanan menjabarkan, menetapkan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.
- b. Belum semua layanan menetapkan standar pelayanan dikarenakan sertifikasi ISO 9001:2008 dalam scop pendidikan.
- c. Belum semua unit kerja pelayanan publik melaksanakan pelayanan yang didukung IT.
- d. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala.
- e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
- f. Kompetensi aparatur penyelenggara pelayanan publik belum optimal.

2. Rencana program dan aktifitas

Beberapa agenda yang akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan semua layanan yang ada termasuk peraturan tentang kebijakan dan SOP pelayanan
- b. Menciptakan budaya pelayanan prima
- c. Pengelolaan Pengaduan
- d. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
- e. Pemanfaatan teknologi Informasi dalam pelayanan

3. Kriteria keberhasilan

Keberhasilan dari agenda Pelayanan Publik di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dapat dilihat dari keluaran (output) dan hasil (outcome) berikut:

Keluaran (Output)

- a. Terbentuknya peraturan tentang kebijakan standar pelayanan
- b. Tersedianya SOP standar pelayanan
- c. Adanya SOP dan unit kerja yang menangani pengelolaan pengaduan
- d. Adanya informasi hasil survei kepuasan terhadap layanan
- e. Laporan penerapan teknologi informasi yang digunakan dalam memberikan pelayanan

Hasil (Outcome)

Terwujudnya pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan pegawai, mahasiswa dan masyarakat.

Indikator *outcome* untuk mengukur area perubahan ini adalah Indeks Capaian Reformasi Birokrasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dengan target-target per tahun sebagai berikut:

Tahun	2017	2018	2019
Indeks Capaian	30%	70%	90%

4. Agenda Prioritas

Agenda prioritas yang menjadi kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

- Penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan semua layanan yang ada termasuk peraturan tentang kebijakan dan SOP pelayanan
- Menciptakan budaya pelayanan prima
- Pengelolaan Pengaduan
- Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
- Pemanfaatan teknologi Informasi dalam pelayanan

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Program dan aktifitas yang ditujukan untuk membentuk birokrasi yang efektif dan efisien di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dilaksanakan secara berkelanjutan dimulai dari semenjak agenda ditetapkan oleh Manajemen Polmanbabel, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja rencana aksi program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk tahun 2017 sampai dengan 2019, sebagai berikut:

Kegiatan dan Tahapan Kerja	Waktu
1. Penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan semua layanan yang ada termasuk peraturan tentang kebijakan dan SOP pelayanan	
a. Perencanaan	April – Desember 2017
b. Pelaksanaan	April – Desember 2017
c. Monitoring dan Evaluasi	April – Desember 2017
d. Perbaikan dan tindak lanjut	April – Desember 2017
2. Menciptakan budaya pelayanan prima	
a. Perencanaan	Januari – Desember 2018
b. Pelaksanaan	Januari'18– Desember 2019
c. Monitoring dan Evaluasi	Januari – Desember 2018
d. Perbaikan dan tindak lanjut	Januari – Desember 2019
3. Pengelolaan Pengaduan	
a. Perencanaan	Januari – Desember 2019
b. Pelaksanaan	Januari – Desember 2019
c. Monitoring dan Evaluasi	Januari – Desember 2019
d. Perbaikan dan tindak lanjut	Januari – Desember 2019
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	
a. Perencanaan	Januari – Desember 2018
b. Pelaksanaan	Januari'18 – Desember 2019
c. Monitoring dan Evaluasi	Januari – Desember 2018
d. Perbaikan dan tindak lanjut	Januari – Desember 2019
5. Pemanfaatan teknologi Informasi dalam pelayanan	
a. Perencanaan	Januari – Desember 2019

b. Pelaksanaan	Januari – Desember 2019
c. Monitoring dan Evaluasi	Januari – Desember 2019
d. Perbaikan dan tindak lanjut	Januari – Desember 2019

6. Penanggungjawab

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Polman Babel, Husman.

7. Rencana Anggaran

Rencana anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana aksi program Penguatan Pengawasan dari tahun 2017 sampai 2019, sebesar:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan semua layanan yang ada termasuk peraturan tentang kebijakan dan SOP pelayanan	20.000.000
2	Menciptakan budaya pelayanan prima	55.000.000
3	Pengelolaan Pengaduan	20.000.000
4	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	5.000.000
5	Pemanfaatan teknologi Informasi dalam pelayanan	20.000.000
Total		120.000.000

I. Quick Wins: Unit Layanan Terpadu

1. Kondisi saat ini

Pemerintah berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan reformasi pelayanan publik itu sendiri yang dilakukan dengan memberikan pelayanan terbaik dengan memanfaatkan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah.

Salah satu agenda reformasi pelayanan yang dicanangkan pemerintah adalah penerapan pelayanan satu atap atau Unit Layanan Terpadu pada setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Melalui Unit Layanan Terpadu diharapkan peningkatan kualitas layanan publik serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung berupaya memanfaatkan momentum reformasi pelayanan dengan membentuk Unit Layanan Terpadu. Unit Layanan Terpadu bertujuan memberikan layanan kepada pemangku kepentingan di bidang akademik dan non akademik secara cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum serta terwujudnya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Tujuan tersebut bisa terwujud dengan melakukan penyederhanaan birokrasi pelayanan, mempercepat waktu pelayanan, mengurangi tahapan pelayanan yang kurang penting, menghilangkan biaya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan prosedur yang transparan.

2. Rencana program dan aktifitas

Dalam rangka membangun Unit Layanan Terpadu di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, akan dilakukan kegiatan perencanaan, pembangunan, sosialisasi, implementasi, dan pengukuran dan evaluasi. Adapun rincian rencana kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

a. Perencanaan Unit Layanan Terpadu

- b. Pembangunan Unit Layanan Terpadu
 - c. Sosialisasi Unit Layanan Terpadu
 - d. Implementasi Unit Layanan Terpadu
 - e. Monitoring dan evaluasi Unit Layanan Terpadu.
3. Kriteria keberhasilan
- Berdasarkan kegiatan yang direncanakan, maka kriteria keberhasilan dari quick wins pembentukan Unit Layanan Terpadu, adalah terbentuknya Unit Layanan Terpadu Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yang menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap sivitas akademika dan masyarakat atas informasi dan pelayanan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
4. Agenda Prioritas
- Program quick wins Unit Layanan Terpadu memprioritaskan dua kegiatan besar, yaitu perencanaan dan pembangunan. Kegiatan perencanaan akan diprioritaskan pada identifikasi jenis layanan di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung; pemilihan alternatif lokasi; dan perancangan layout ruang Unit Layanan Terpadu. Sedangkan kegiatan pembangunan akan diprioritaskan pada konstruksi ruang; pengadaan sarana dan prasarana; dan penyediaan jaringan dan software.
5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja
- Sesuai dengan rencana kegiatan, program quick wins Unit Layanan Terpadu akan dilaksanakan selama 12 bulan, mulai dari Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, dengan waktu pelaksanaan dan tahapan kerja sebagai berikut:

Kegiatan dan Tahapan Kerja	Waktu
1. Perencanaan Unit Layanan Terpadu	
a. Identifikasi jenis layanan	Januari – Maret 2018
b. Penentuan alternatif lokasi ULT	Januari – Maret 2018
c. Layout ruang ULT	Januari – Maret 2018
d. Penetapan struktur organisasi ULT	Januari – Maret 2018
e. Penyusunan SOP ULT	Januari – Maret 2018
2. Pembangunan Unit Layanan Terpadu	
m. Konstruksi ruang ULT	April – Juli 2018
n. Pengadaan sarana dan prasarana ULT	April – Juli 2018
o. Penyediaan jaringan dan software	April – Juli 2018
3. Sosialisasi Unit Layanan Terpadu	
a. Revisi Juknis/Prosedur Layanan	Juli 2018
b. Training Pegawai ULT	April – Juli 2018
4. Implementasi Unit Layanan Terpadu	
Operasionalisasi ULT	Agustus 2018
5. Monitoring dan evaluasi Unit Layanan Terpadu	
a. Monitoring dan Evaluasi	Desember 2018
b. Perbaikan dan tindak lanjut	Januari – Des 2019

6. Penanggungjawab
- Penanggung jawab pelaksanaan program dan rencana aksi peningkatan pelayanan publik adalah Pembantu Direktur III.
7. Rencana Anggaran
- Rencana anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana aksi program Penguatan Pengawasan sebesar:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Perencanaan Unit Layanan Terpadu	10.000.000
2	Pembangunan Unit Layanan Terpadu	150.000.000
3	Sosialisasi Unit Layanan Terpadu	10.000.000
4	Implementasi Unit Layanan Terpadu	40.000.000
5	Monitoring dan evaluasi Unit Layanan Terpadu	10.000.000
Total		220.000.000

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian, dan lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam peta jalan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung diperbaiki pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Pada lingkup unit/satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan unit/satuan kerja untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/satuan kerja yang melaksanakan Quick Wins, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
2. Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
3. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
4. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam peta jalan dengan realisasinya;
5. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh SPI.

B. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dilaksanakan setiap bulan Juni dan bulan Desember. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat institusi, sebagai berikut:

1. Evaluasi bulan Juni atau bulan Desember di tingkat unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi bulan Juni atau bulan Desember di tingkat Politeknik, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

1. Hasil-hasil monitoring;
2. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
3. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam peta jalan dengan realisasinya;
4. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Dokumen peta jalan reformasi birokrasi merupakan dokumen yang mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai agenda reformasi birokrasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yang akan dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada untuk melaksanakan berbagai agenda reformasi birokrasi. Disusun melalui suatu pendekatan komprehensif dengan menghimpun data dan analisis untuk bisa menghasilkan suatu agenda perubahan sesuai dengan amanah dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah. Kinerja akan meningkat apabila ada motivasi yang kuat secara keseluruhan. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (*output*), nilai tambah (*value added*), hasil (*outcome*), dan manfaat (*benefit*) yang lebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem reward and punishment yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Reformasi merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan memperhatikan berbagai capaian-capaian yang telah diperoleh dari pembenahan saat ini agar dapat menjadi pijakan dan perspektif pembenahan pada masa depan selama lima tahun. Aparatur harus sadar bahwa reformasi birokrasi akan mengubah birokrasi pemerintah menjadi birokrasi yang kuat dan menjadi pemerintahan kelas dunia, yang mampu memberikan fasilitasi dan pelayanan publik yang prima dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu, reformasi birokrasi harus dilakukan secara sungguh-sungguh, konsisten, melembaga, bertahap, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk birokrasi yang mampu mendukung dan mempercepat keberhasilan pembangunan diberbagai bidang.

LAMPIRAN

Surat Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Tim Reformasi Birokrasi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.